

**DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN
MELALUI BANTUAN LANGSUNG PEMBERDAYAAN SOSIAL DI
KELURAHAN MAREKU KECAMATAN TIDORE UTARA KOTA
TIDORE KEPULAUAN**

Oleh :

Ifan Baharuddin¹, Yusuf Kamis²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Nuku

E-Mail : Ifan.baharuddin@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang nyaris sama tua dengan usia peradaban manusia, disetiap negara atau daerah selalu saja ada kemiskinan walaupun seberapa baik dan majunya negara atau daerah tersebut, ini seolah menjadi fatsoen sosial bahwa dimana ada orang kaya pasti ada orang miskin. Permasalahan kemiskinan di Indonesia saat ini berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Pemerintah mengakui bahwa angka kemiskinan mencapai 13,3 % dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 237,6 juta jiwa, jumlah ini masih tergolong tinggi karena mencapai 31,6 juta orang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial di Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, untuk teknik analisis datanya berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Program Pemberdayaan masyarakat Miskin melalui Bantuan langsung Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi keluarga miskin di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Tidore Utara diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan), menyediakan sebagian kebutuhan yang diperlukan bagi masyarakat miskin, menciptakan keharmonisan hubungan sosial antar warga, menyelesaikan masalah sosial yang dirasakan keluarga miskin, pengembangan diri dan sebagai wadah berbagi pengalaman antar anggota.

Kata Kunci : Implementasi, Dampak, Kebijakan, Program, Kemiskinan

A. PENDAHULUAN

Menurut Sayogyo (Dewantoro 1995;12) menyatakan bahwa tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang, per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan, miskin dapat dikategorikan, yaitu (a) Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 KG nilai tukar beras per orang per

tahun, (b) Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 KG nilai tukar beras per orang per tahun, (c) Paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 KG nilai tukar beras per orang per tahun.

Sedangkan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengukur kemiskinan berdasarkan kriteria keluarga pra sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS 1).

Keluarga Pra KS yaitu keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah bersemen 80 %, dan berobat ke Puskesmas bila sakit. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu makan daging/telur/ikan, membeli pakaian satu stel pertahun, rata-rata luas lantai rumah 8 m² per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak berumur 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama tiga tahun.

Kemiskinan ini pada dasarnya dipicu oleh rendahnya produktivitas kegiatan masyarakat dengan penyebab kemiskinan yang kompleks dimulai dari kelembagaan ekonomi masyarakat tidak berkembang, sehingga menyulitkan masyarakat miskin untuk mengakses permodalan, tingkat pendidikan yang tergolong rendah, kondisi sosial budaya yang kurang mendukung, penyebab agensia seperti penguasaan lahan dan ekonomi yang begitu besar oleh beberapa perusahaan serta infrastruktur akses jalan dan pasar yang menyebabkan masyarakat menjadi hidup terpencil dan sulit melakukan kegiatan ekonomi.

Pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan menunjukkan perubahan paradigma pembangunan dari pendekatan pertumbuhan (*growth approach*) kepada pendekatan kemandirian (*self-reliance approach*). Namun demikian, akibat telah termajinalisasi dalam waktu yang lama, masyarakat mengalami kesulitan dalam

mengartikulasikan otonominya sebagai 2 pelaku utama pembangunan.

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang nyaris sama tua dengan usia peradaban manusia, disetiap negara atau daerah selalu saja ada kemiskinan walaupun seberapa baik dan majunya negara atau daerah tersebut, ini seolah menjadi *fatsoen sosial* bahwa dimana ada orang kaya pasti ada orang miskin. Permasalahan kemiskinan di Indonesia saat ini berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Pemerintah mengakui bahwa angka kemiskinan mencapai 13,3 % dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 237,6 juta jiwa, jumlah ini masih tergolong tinggi karena mencapai 31,6 juta orang (Rajasa, 2011).

Data dari BPS Kota Tidore Kepulauan menyebutkan jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan 90 055 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 34 020 jiwa atau 37,78 persen dan di daerah perdesaan sebanyak 56 035 jiwa atau 62,22 persen (BPS Tipek: 2019)

Hasil penghitungan kemiskinan Kabupaten Kota tahun 2016 persentase Penduduk Miskin di Kota Tidore Kepulauan mengalami penurunan menjadi 5,07 persen atau turun 0,31 persen dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 5,38 persen dari jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan. Menurut Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan jumlah penduduk miskin di Kota Tidore Kepulauan mengalami penurunan sebanyak 240 jiwa, dari 5.200 jiwa pada tahun 2015 menjadi 4.960 jiwa pada tahun 2016, menurutnya juga data yang memuat indeks kedalaman kemiskinan yang merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengalami penurunan menjadi 0,26 persen, yang berarti rata-rata pengeluaran penduduk

miskin semakin mendekati garis kemiskinan (Eky, 2019).

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Lembaganya di daerah yaitu Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan yang merupakan instansi teknis, pada Tahun 2011 melalui program pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial (P2MM-BLPS) telah memberdayakan kepala keluarga yang dibentuk dalam beberapa kelompok KUBE (Kelompok Usaha Bersama) masyarakat miskin dengan bidang usahanya Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Home industri (Direktorat Dayasos & Departemen Sosial RI, 2008).

Untuk dapat mengoptimalkan upaya program pemberdayaan masyarakat miskin pemerintah terus berupaya dengan terus merevisi peraturan, model dan mekanisme penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat miskin melalui kegiatan KUBE. Sehingga pada tahun 2011 kementerian sosial bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening kelompok KUBE tersebut, hal ini berbeda dengan mekanisme sebelumnya dimana dana bantuan disalurkan menggunakan kerjasama pihak ketiga, upaya ini bertujuan agar tidak terjadi pengurangan biaya administrasi dan yang lebih penting kelompok dapat mengelola sendiri keuangan yang diberikan (Kemensos RI, 2011-2012).

B. KAJIAN PUSTAKA

Kemandirian dari sebuah KUBE merupakan harapan bagi pemerintah, dimana sebuah kelompok mampu mengambil keputusannya sendiri dalam langkah perjalanan mereka mengapai tujuan yang lebih baik. Oleh karena itu untuk melihat bagaimana kemandirian dalam

sebuah kelompok, proses adalah hal yang terpenting. Proses merupakan state of becoming, yaitu keadaan dimana seseorang atau kelompok terus-menerus berusaha untuk mencapai sesuatu. Proses sendiri bersifat dinamis dan tidak statis, sehingga tidak membuat seseorang atau kelompok terjebak ke dalam situasi ideal tertentu (Damayanti, 2018).

Menurut Wulandari (2011) & Putryningsih (2018) menyatakan bahwa melalui program pemberdayaan masyarakat miskin dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) diharapkan menjadi lokasi program untuk menyediakan kontribusi pendanaan untuk meningkatkan motivasi bagi keluarga miskin supaya maju, meningkatkan interaksi dan kerja sama dalam kelompok keluarga miskin, mendayagunakan potensi sumber sosial ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan dan mengembangkan ekonomi pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan pihak yang terkait.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dengan pemberian modal usaha yang disalurkan melalui perbankan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE), merupakan salah satu program yang diarahkan agar terjadinya pergeseran paradigma pembangunan di daerah dari yang bersifat top down menjadi lebih bersifat partisipatif dan konvergen antar berbagai pihak terkait. Sejalan dengan hal tersebut terjadi pula pergeseran dalam pengembangan Kelompok Bersama (KUBE) dari *projek oriented menjadi program oriented* (Sarjiyanto, 2017).

Pemberdayaan masyarakat merupakan istilah baru dalam konsep pembangunan berkelanjutan di dunia ketiga. Konsep ini seringkali menimbulkan

persepsi yang sama dengan istilah pembangunan masyarakat karena pada pelaksanaannya seringkali terjadi tumpang tindih.[10]. “Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi besar dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people based development*). Pendekatan ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya material dan non material yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan (Vionasari, 2019).

Munculnya gagasan tentang pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendekatan KUBE didasarkan pada suatu pemikiran bahwa setiap orang memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan. Potensi ini sifatnya sangat beragam, ada potensi yang dapat berkembang secara individual tanpa bantuan atau campur tangan orang lain dan ada juga potensi yang berkembang dengan bantuan atau pertolongan orang lain atau melalui pendekatan kelompok (Qur’an, 2017).

Dilihat dari proses pembinaan dan proses pendampingan, pendekatan kelompok dalam proses pemberdayaan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pendekatan individual baik dari segi biaya, tenaga maupun waktu, di mana tenaga satu orang pendamping dapat melayani sekaligus beberapa orang anggota KUBE daripada harus melayani orang per orang (Ningrum, 2017).

Sementara itu menurut Suprihatin (2017) & Bancin (2011) Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial di Kelurahan Mareku sebagai salah satu kebijakan publik telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kota Tidore Kepulauan

berdasarkan mekanisme kegiatan yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berhasil dan tepat guna.

C. METODE PENELITIAN

Kajian ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat supaya dapat ditemukan hasil menyeluruh dalam melakukan penyelidikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Kawasan kajian yang dipilih boleh menghasilkan suatu penemuan yang lebih relevan terhadap pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Bantuan Langsung Sosial.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*fiel research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagaimana deskriptif sederhana dan juga menyelidiki kenyataan yang terjadi sebagaimana adanya tanpa ada manipulasi (Riyadi, 2019)

Informan dalam penelitian ini yaitu Pendamping KUBE, anggota KUBE, dan Sekretaris Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan.

Disamping itu juga menggunakan instrumen Pengumpulan data-data KUBE, observasi awal ke lokasi penelitian, pengumpulan dokumen yang bersumber dari buku-buku, dokumen- dokumen kelompok KUBE dan artikel berita online lokal hingga nasional. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk lokasi Penelitian di lakukan di Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program Pemberdayaan masyarakat miskin melalui mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dengan pemberian modal usaha yang disalurkan melalui perbankan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Tidore Kepulauan, merupakan salah satu upaya Kementerian Sosial melalaui dinas Teknisnya di daerah yakni Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial di Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan.

Analisis Pelaksanaan Program

Program Pemberdayaan masyarakat Miskin melalui Bantuan langsung Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi keluarga miskin di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Tidore Utara diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan), menyediakan sebagian kebutuhan yang diperlukan bagi masyarakat miskin, menciptakan keharmonisan hubungan sosial antar warga, menyelesaikan masalah sosial yang

dirasakan keluarga miskin, pengembangan diri dan sebagai wadah berbagi pengalaman antar anggota.

Melalui kelompok, setiap keluarga miskin diharapkan dengan program ini dapat saling berbagi pengalaman, saling berkomunikasi, saling mengenal, dapat menyelesaikan berbagai persoalan dan kebutuhan yang dirasakan. Dengan sistem KUBE, kegiatan usaha yang tadinya dilakukan secara sendiri-sendiri kemudian dikembangkan dalam kelompok, sehingga setiap anggota dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif, usaha kesejahteraan sosial serta kemampuan berorganisasi, seperti yang diungkapkan oleh pegawai Dinas Sosial yang membawahi urusan KUBE sebagai berikut : “Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dengan pemberian modal usaha yang disalurkan melalui perbankan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE), merupakan salah satu program yang diarahkan agar terjadinya pergeseran paradigma pembangunan di daerah dari yang bersifat top down menjadi lebih bersifat partisipatif dan konvergen antar berbagai pihak terkait. Sejalan dengan hal tersebut terjadi pula pergeseran dalam pengembangan Kelompok Bersama (KUBE) dari proyek oriented menjadi program oriented. Implikasi perubahan tersebut dalam pengembangan Kelompok Usaha Bersama Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (KUBE BLPS) adalah terjadinya peningkatan keterlibatan dari unsur masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat, Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dapat diakses oleh anggota KUBE BLPS.

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa Pendekatan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang telah menjadi identitas Departemen Sosial dalam penanggulangan kemiskinan perlu secara terus menerus dijalankan dan dikembangkan. Bantuan langsung pemberdayaan sosial yang disalurkan diharapkan mengurangi kompleksitas masalah masyarakat miskin. Jika tidak ditangani secara serius dalam bentuk jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial maka dampak sosial yang akan terjadi yaitu kerawanan sosial, tindak kejahatan dan dapat menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial yang pada akhirnya menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah, serta membutuhkan biaya pembangunan yang lebih besar dan secara potensial akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Tujuan program pemberdayaan sosial melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial masyarakat miskin adalah Perlindungan sosial terhadap hak-hak dasar keluarga masyarakat miskin, termasuk anak-anak dan perempuan untuk mendapatkan akses pelayanan sosial dasar guna peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosialnya, juga memiliki tujuan sebagai Peningkatan kualitas kehidupan dan kemandirian serta akses yang seluas-luasnya bagi keluarga masyarakat miskin terhadap sumberdaya ekonomi, pelayanan sosial dasar, kebijakan publik dan jaminan sosial. selanjutnya dalam rangka Peningkatan prakarsa dan peran aktif warga masyarakat, terutama warga masyarakat mampu dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan, serta Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga masyarakat miskin dalam mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan Program pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial di Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara sebagai salah satu kebijakan publik telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan berdasarkan mekanisme kegiatan yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, sebagai upaya memberdayakan masyarakat miskin namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berhasil dengan baik.

Aspek mutu pelayanan seperti asisitensi/pendampingan dan monitoring serta evaluasi dari Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan masih rendah, hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya apatur yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan terkait dengan kompetensi yang dimiliki, tingkat pendidikan pendamping, sarana dan prasarana sebagai perangkat pendukung dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat miskin belum memadai, juga faktor membangun komunikasi lintas sektor, penyediaan sumber daya, sikap dan perilaku pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi yang berbelit belum sepenuhnya mendukung aspek psikis dan budaya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial di Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara.

Pembahasan

Program pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial di Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan sesuai mekanisme kegiatan yang tertuang

dalam petunjuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial yang di keluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Aspek mutu pelayanan seperti asistensi/pendampingan dan monitoring serta evaluasi dari Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan masih rendah, hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya aparatur yang di miliki oleh Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan terkait dengan kompetensi yang dimiliki, tingkat pendidikan pendamping, sarana dan prasarana sebagai perangkat pendukung dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat miskin belum memadai, juga faktor membangun komunikasi lintas sektor, penyediaan sumber daya, sikap dan perilaku pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi yang berbelit belum sepenuhnya mendukung aspek psikis dan budaya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan pemberdayaan sosial di Kecamatan Tidore Utara.

Sebagaimana sebuah kebijakan /program, ketika ditetapkan pasti memiliki dampak yang ditimbulkan, hal ini juga yang terjadi pada saat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial di Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara. Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program tersebut adalah dampak ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi yang ditimbulkan ketika dilaksanakannya program pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial di kecamatan Tidore Utara.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Program pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan langsung

pemberdayaan sosial di Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara terbukti telah berdampak terhadap peningkatan aspek ekonomi dan sosial, berdasarkan data menunjukkan bahwa, pendapatan subyek penelitian sebelum dan setelah mengikuti program pengentasan kemiskinan mengalami peningkatan, namun belum sepenuhnya berdampak secara signifikan dalam kehidupan subyek penelitian, hal ini dikarenakan aspek mutu pelayanan seperti asistensi / pendampingan dan monitoring serta evaluasi dari Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan masih rendah, karena minimnya sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan terkait dengan kompetensi yang dimilikinya, tingkat pendidikan pendamping, sarana dan prasarana sebagai perangkat pendukung dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat miskin belum memadai.

Urgensi Penelitian

Berangkat dari penjelasan diatas maka sangat penting jika program pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial ini benar- benar direalisasikan dan dijalankan oleh kelompok-kelompok KUBE, tidak hanya dalam 1 tahun pelaksanaan tetapi dapat berkelanjutan dari tahun ke tahun sehingga dampak nyata dari program pemerintah ini benar-benar terealisasi untuk meningkatkan pendapatan di kalangan

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial di Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan lebih diarahkan pada dampak peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat saja, belum

sepenuhnya menjangkau dampak sosial, psikis dan budaya subyek penelitian. Untuk itu dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi pengelola program tingkat pusat
 - a. Program yang dikembangkan hendaknya *integratif*, artinya tidak hanya berorientasi pada pengembangan aspek ekonomi saja namun juga menyangkut aspek lain seperti sosial, psikis dan budaya
 - b. Dalam mengidentifikasi kemiskinan dan dalam perumusan kebijakan program di daerah perlu dipertimbangkan penggunaan indikator kemiskinan lokal sehingga program yang dilaksanakan relatif relevan, mendapat dukungan penuh dari sasaran program dan berbagai pihak terkait serta memiliki nilai kemanfaatan secara berkelanjutan
 - c. Memfasilitasi pengangkatan dan penempatan jabatan fungsional pekerja sosial di daerah atau penyelenggaraan diklat pekerjaan sosial bagi petugas sosial di daerah
 - d. Menyempurnakan pendekatan KUBE dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang ada
2. Bagi pengelola program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
 - a. Menggunakan indikator kemiskinan lokal dalam penentuan subyek penelitian dan dalam pemilihan program pengentasan kemiskinan yang relevan di daerah
 - b. Menjalinkan kerjasama yang sinergis antara pengelola program pengentasan kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta dengan petugas di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.
3. Bagi pengelola pengentasan kemiskinan di kelurahan/desa.
 - a. Sebagai ujung tombak pembangunan di kelurahan, petugas perlu menjalin kerjasama dengan pihak terkait.
 - b. Pendampingan kepada subyek penelitian program perlu dilaksanakan secara kontinyu sehingga program yang dilaksanakan berdampak secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan.
 - c. Monitoring dan evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan perlu dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan sehingga dapat diukur tingkat keberhasilannya.
4. Bagi peneliti yang berminat untuk mengembangkan dan mengkaji lebih mendalam sehubungan dengan penelitian ini agar:
 - a. Penelitian ini perlu dikembangkan secara mendalam dengan subyek penelitian yang lebih luas
 - b. Peneliti lain dapat mengembangkan model penelitian dampak program kemiskinan dengan kombinasi variabel yang lebih banyak

- c. Perlu dikembangkan pendekatan atau metodologi yang lebih bervariasi untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan, 2019, *Garis Kemiskinan (Rupiah) dan Penduduk Miskin (Persen) Kota Tidore Kepulauan 2011-2018*. url “
<https://tikepkota.bps.go.id/dynamictable/2015/04/09/5/garis-kemiskinan-rupiah-dan-penduduk-miskin-persen-kota-tidore-kepulauan-2011-2018.html>(diakses: 10 Agustus 2019).
- Baharuddin, Ilfan. 2018. Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial Di Kelurahan Gubuksuma Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Akrab Juara*. 3.
- Bancin, Martua Hasiholan. 2011. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Kasus: Bandung Barat). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. 22.
- Damayanti, Putri (2018). Proses Kemandirian Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mekar Sari Di RT 07 Kelurahan Guntung Kota Bontang. *Sosiatri-Sosiologi*, 6 (4),164-178.
- Direktorat Dayasos dan Departemen Sosial RI, 2008. *Modul Pendamping Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (P2FM-BLPS)*. Jakarta.
- Eky, 2019, Orang Miskin Di Kota Tidore Kepulauan Turun 5,07%, Ternate Tengah: Aspirasi Malut.Com Terdepan dan terpercaya. url :<http://www.aspirasimalut.com/2017/07/13/orang-miskin-di-tidore-kepulauan-turun-507-persen/>. (diakses: 10 Agustus 2019).
- Genius. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Di Kelurahan Tembiling Tanjung Teluk Bintang Kabupaten Bintang*. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang.
- Hatta Rajasa, 2011 tentang pertumbuhan ekonomi, diakses dari situs www.kompas.com pada tanggal 26 Februari 2016.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2011. *Profil KUBE dan Pendamping Berprestasi 2011*. Jakarta: Ditjen Dayasos dan Penanggulangan Kemiskinan. PT. Alimas Ratu Gemilang.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2012. *Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)*. Jakarta: Ditjen Dayasos dan Penanggulangan Kemiskinan.
- Ningrum, Diah Ayu. 2017. *Peran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Menangani Kemiskinan Di KUBE Sejahtera Desa Giripurno Ngadirejo Temanggung*. Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta.

- Noor, Munawar. Tanpa Tahun. Sarjiyanto, 2017. Peran Kelompok Penanggulangan Kemiskinan Di Masyarakat (KUBE Lumbang Sinergi) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Desa Bulukan Sukoharjo Jawa Tengah. *JIEP*,17.
- Putriningsih, Dewa Ayu Warta & Jember, I Made, (2018). Efektivitas Dan Dampak Program Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran (RTS) Di Kabupaten Gianyar. *EP Unud*, 7 [3]: 445-475.
- Qur'an, Amanah Aida. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Studi Pada KUBE Kaligondang Purbalingga Jawa Tengah)*. Program Studi Ekonomi Syariah. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Riyadi, Jakra Hadepa. 2019. *Penanggulangan Kemiskinan Berbasis E-Warong Program Keluarga Harapan (Studi E-Warong KUBE Mugi Barokah Desa Klopogodo Kec. Gombang Kab. Kebumen Prov. Jawa Tengah)*. Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Jogjakarya.
- Suprihatin. 2017. *Fungsi Kelompok Usaha Bersama Dalam Pemberdayaan Komunitas Pedagang Di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro*. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Vionasari, Delvin. 2019. *Analisis Faktor Kegagalan Program kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kelurahan Dompok*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.
- Wulandari, Fazra Raisa. 2011. *Peran Pekerja Sosial Masyarakat Kelompok Usaha Bersama Dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin Di Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Tangerang*. Program Studi Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.